

**EVALUASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS
SOSIAL KABUPATEN KOLAKA****Natasya Rongre¹, Neks Triani², Nichen³**^{1,2,3}Universitas Sembilanbelas November KolakaEmail: natasyaseptember23@gmail.com¹, nekstriani1987@gmail.com²,
nichennichen292109@gmail.com³**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengetahui bagaimana kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Dalam melakukan pengumpulan data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kolaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka belum sepenuhnya memenuhi syarat agar dapat dikatakan sebagai laporan keuangan yang berkualitas, karena pada indikator Relevan terdapat kriteria yang belum tercapai yaitu indikator lengkap. Sementara tiga indikator lainnya, yaitu andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami telah tercapai dengan baik. Dinas Sosial Kabupaten Kolaka juga telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, termasuk pembelajaran mandiri pegawai, pemanfaatan aplikasi SIPD yang terformat dengan baik, serta penguatan sistem pengendalian internal dan audit eksternal. Dengan demikian, meskipun terdapat tantangan dalam pemahaman SAP, laporan keuangan yang disusun tetap dapat dikatakan berkualitas dan memenuhi sebagian besar kriteria kualitas yang diperlukan.

Kata Kunci: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kualitas Laporan Keuangan, Standar Akuntansi Pemerinta.

Abstract

This research aims to evaluate and find out the quality of regional government financial reports at the Kolaka Regency Social Service based on Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards (SAP). This research used a qualitative method. The data sources used in this research are primary and secondary data. Researchers used observation, interview, and documentation data collection techniques. This research was conducted at the Kolaka Regency Social Service Office. The research results show that the Regional Government Financial Report at the Kolaka Regency Social Service does not fully meet the qualitative requirements for financial reports, because in the Relevant dimension, there are indicators that have not been achieved, namely complete indicators. Meanwhile, the other three dimensions such as reliable, comparable and understandable have been achieved well. The Kolaka Regency Social Service has also made various efforts to improve the quality of financial reports, including employee independent learning, well-formatted SIPD applications, and strengthening the internal control and external audit systems. Therefore, even though there are challenges in understanding SAP, the financial reports prepared can still be said to be of high quality and meet most of the required quality criteria.

Keywords: Regional Government Financial Reports, Quality of Financial Reports, Government Accounting Standards

A. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan yang baik tergantung pada tata kelola pemerintahan. Dalam sistem manajemen organisasi, tata kelola yang baik bertujuan untuk mencapai efisiensi, Efektivitas, ekonomis dan produktivitas pengelolaan sumber daya ekonomi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk mencapai tujuan organisasi. Pemerintah mempunyai kewajiban memiliki sistem manajemen, prosedur dan kebijakan untuk membantu manajemen personal. Saat ini pemerintah Indonesia sedang berupaya dalam meningkatkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan bertanggung jawab (Subekti dkk., 2024)

Persoalan kinerja pemerintah daerah saat ini menjadi sorotan publik karena kurang memberikan hasil yang baik bagi masyarakat. Masyarakat menuntut pemerintah efektif menjalankan tugasnya dan mewujudkan konsep otonomi daerah. Pada prinsipnya pembangunan daerah bertujuan untuk memberdayakan masyarakat secara menyeluruh dengan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada seperti pelayanan pemerintah, kemampuan sosial ekonomi masyarakat, dan sumber daya alam di daerah tersebut. Untuk mencapai hal ini secara efektif, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas melalui otonomi daerah. Dengan cara ini, pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan bantuan keuangan atau subsidi dana dari pemerintah pusat (Pratiwi dkk., 2022)

Konsep Akuntansi

Akuntansi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah “Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya”.

Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dalam Nasution, (2021) adalah “laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan”. Laporan keuangan adalah proses pencatatan transaksi keuangan perusahaan, menyajikan posisi keuangan perusahaan untuk suatu periode akuntansi, dan memberikan gambaran kinerja perusahaan selama periode tertentu (Wicaksono dkk., 2022).

Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Laporan yang berkualitas ditentukan oleh kemampuannya menyampaikan informasi keuangan yang berharga kepada penggunanya. Laporan-laporan ini penting untuk memenuhi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan laporan tersebut.

Karakteristik Kualitas laporan Keuangan

Laporan keuangan dapat dianggap berkualitas apabila memenuhi kriteria atau indikator kualitatif yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Rompas & Kindangen, 2022), yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan dinilai relevan apabila informasi yang terkandung di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka dalam menilai peristiwa yang telah terjadi atau sedang berlangsung, serta untuk memprediksi masa depan, sekaligus memungkinkan mereka untuk melakukan koreksi terhadap penilaian di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki beberapa unsur berikut:

- 1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), yaitu informasi yang memungkinkan pengguna untuk mengoreksi atau mengonfirmasi ekspektasi mereka terhadap peristiwa di masa lalu.
- 2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), yakni informasi yang dapat digunakan untuk memprediksi kejadian-kejadian di masa depan berdasarkan analisis terhadap peristiwa masa lalu dan keadaan saat ini.
- 3) Tepat waktu (*timeliness*), yaitu informasi yang disajikan dengan tepat waktu sehingga dapat memberikan pengaruh dan menjadi bahan pertimbangan yang berguna dalam proses pengambilan keputusan.
- 4) lengkap, yakni mencakup semua informasi akuntansi yang diperlukan yang dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Semua informasi yang mendasari setiap komponen dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan informasi tersebut.

2. Andal

Andal berarti informasi dalam laporan keuangan bebas dari kesalahan materiil dan penyajian yang menyesatkan, menggambarkan setiap fakta secara jujur, serta dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang andal memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Penyajian jujur, yaitu informasi yang menggambarkan secara akurat transaksi dan kejadian lainnya yang memang seharusnya disajikan atau yang layak untuk disajikan.
 - 2) Dapat diverifikasi, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji kebenarannya, dan hasil pengujian tersebut apabila dilakukan oleh pihak yang berbeda tetap menunjukkan kesimpulan yang konsisten.
 - 3) Netralitas, yaitu informasi disajikan dengan objektivitas, tanpa bias dan tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu.
3. Dapat dibandingkan, artinya informasi dalam laporan keuangan akan lebih bermanfaat jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan dari periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain secara umum.
 4. dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan mudah dipahami oleh pengguna dan disajikan dalam bentuk serta istilah yang sesuai dengan tingkat pemahaman para pengguna.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut karena penyajian laporan keuangan Dinas Sosial Kabupaten Kolaka sudah menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua. Namun, masih terdapat kekurangan SDM yang memahami standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Laporan keuangan Dinas sosial juga sering kali mengalami kesalahan atau ketidaksesuaian data, yang disebabkan oleh penginputan data yang kurang teliti atau kesalahan dalam pencatatan transaksi.

Beberapa penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Rompas & Kindangen, 2022) yang menemukan bahwa kualitas keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik daerah kota Manado dapat dikategorikan andal, relevan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan disusun secara konsisten dan berkala serta disajikan tepat waktu sesuai dengan periode akuntansi yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut dan memberikan perhatian khusus pada laporan keuangan Dinas Sosial Kabupaten Kolaka dalam rangka penelitian yang berjudul **“Evaluasi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka”**.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengevaluasi kualitas laporan keuangan Dinas Sosial Kabupaten Kolaka dengan mengukur sejauh mana laporan keuangan tersebut memenuhi indikator relevan, andal, dapat dibandingkan dan mudah dipahami dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada Dinas Sosial Kabupaten kolaka untuk menghadapi kendala dalam meningkatkan kualitas LKPD

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2005) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (A. F. Nasution, 2023)

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas sosial Kabupaten Kolaka yang beralamat Jl. Pendidikan No.11, Laloeha, Kec. Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data atau informasi yang bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikontruksikan menjadi hipotesis atau teori. Data kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna (Sugiyono, 2019)

Dalam melakukan pengumpulan sumber data penelitian, peneliti melakukan pengumpulan data dalam bentuk data primer dan data sekunder. Menurut Nasution (2023) sumber data dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Data primer adalah data-data utama yang didapatkan dari subjek penelitian secara langsung atau dari tangan pertama. Data primer ini bisa berupa hasil wawancara dengan subjek, hasil angket, hasil tes, dan sebagainya.
2. Data sekunder adalah data-data yang bukan didapatkan atau diperoleh dari subjek penelitian atau sumber pertama yang digunakan untuk penelitian. Data sekunder ini bersifat pelengkap dan penguat dari data primer.

Teknik Pengumpulan Data

1. observasi yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung mengenai kendala dan permasalahan yang terjadi di lapangan. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan yang akurat tentang kualitas laporan keuangan apakah laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
2. wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu
3. Dokumnetasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2023) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. *Data collection*/pengumpulan data

Pengumpulan data yaitu semua informasi dicatat secara objektif dan sesuai dengan temuan dari observasi dan wawancara di lapangan.

2. *Data reduction*/reduksi

Tahap reduksi yaitu data dilakukan untuk memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.

3. *Data display*/penyajian data

setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplay-kan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, tabel dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. *Conclusion drawing/verification*

Setelah penyajian data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk itu diusahakan mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan dan sebagainya. Jadi, dari data tersebut berusaha diambil kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian

C. HASIL DAN PEMBAHASAN**Ringkasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka**

Dalam pengelolaan keuangan Dinas Sosial Kabupaten Kolaka, penerapan perlakuan akuntansi yang mencakup transaksi pendapatan dan belanja daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Adapun sistem prosedur pengelolaan keuangan dan akuntansi pemerintah daerah mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan keuangan pemerintah menurut Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdiri dari tujuh komponen. Namun, laporan keuangan yang disajikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kolaka hanya mencakup lima Komponen laporan keuangan. Berikut perbedaan komponen laporan keuangan pemerintah berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dengan Laporan keuangan Dinas sosial kabupaten Kolaka.

**Tabel 4.1 Perbedaan Komponen Laporan Keuangan antara PP No. 71 Tahun 2010
Dengan Dinas Sosial Kabupaten Kolaka**

Komponen laporan keuangan Pemerintah berdasarkan PP No 71 Tahun 2010	Komponen laporan keuangan Dinas Sosial kabupaten Kolaka
1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 3. Laporan Neraca 4. Laporan Operasional 5. Laporan Arus Kas 6. Laporan Perubahan Ekuitas 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Laporan Neraca 3. Laporan Operasional 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Sumber: Data Diolah Penulis, 2025

Berikut data Laporan keuangan Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Tahun 2020:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan Pendapatan, Belanja, dan Surplus/Defisit serta perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Berikut Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dinas Sosial Kabupaten Kolaka per 31 desember 2020 dan 2019.

**Tabel 4.2 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Per 31 Desember 2020**

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%
PENDAPATAN –LRA	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Asli Daerah-LRA	0,00	0,00	0,00
BELANJA	10.805.980.179,00	10.602.768.437,00	98.12
Belanja Operasi	10.805.980.179,00	10.602.768.437,00	98.12
Belanja pegawai	2.850.336.499,00	2.781.739.908,00	97.59
Belanja barang dan jasa	7.955.623.680,00	7.821.028.529,00	98.21
Surplus/(Defisit)	(10.805.980.179,00)	(10.602.768.437,00)	98,12
Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA)	(10.805.980.179,00)	(10.602.768.437,00)	98,12

Sumber: data diolah penulis, 2025

2. Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas. Berikut laporan Neraca Pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Per 31 Desember 2020 Dan 2019.

**Tabel 4.3 Laporan Neraca Dinas Sosial Kabupaten Kolaka
Per 31 Desember 2020 Dan 2019**

Uraian	2020	2019
ASET		
Aset lancar	343.000,00	470.000,00
Aset tetap	6.548.718.442,00	6.931.733.171,00
Aset lainnya	38.300.000,00	38.300.000,00
Jumlah Aset	6.587.361.442,00	6.970.503.171,00
Kewajiban		
Kewajiban jangka pendek	0.00	0.00
Kewajiban jangka panjang	0.00	0.00
Jumlah Kewajiban	0.00	0.00

Ekuitas		
Ekuitas	539.061.615,00	961.369.237,00
RK PPKD	6.048.299.827,00	6.009.133.934,00
Jumlah Ekuitas	6.587.361.442,00	6.970.503.171,00

Sumber: data diolah penulis, 2025

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas (LPE) adalah laporan yang menggambarkan perubahan ekuitas dari tahun berjalan dibandingkan dengan tahun-tahu sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 2010, laporan ini menyajikan beberapa pos, yaitu ekuitas awal, surplus/defisit, koreksi dan ekuitas akhir. Berikut laporan Perubahan Ekuitas Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Per 31 Desember 2020 Dan 2019.

Tabel 4.4 Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Per 31 Desember 2020 Dan 2019

Uraian	2020	2019
Ekuitas awal	6.970.503.171,00	6.347.750.340,00
Surplus/defisit-LO	(6.461.899.036,00)	(5.418.382.277,00)
Penambahan nilai aset tetap	419.970.000,00	0.00
Penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2019	(389.512.520,00)	(1.638.826,00)
Koreksi akumulasi penyusutan aset lain-lain	0.00	33.640.000,00
EKUITAS AKHIR	539.061.615,00	961.369.237,00

Sumber: data diolah penulis, 2025

4. Laporan Operasional

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pada Laporan Operasional (LO) menyajikan pos-pos yaitu pendapatan-LO dari kegiatan operasi, beban dari kegiatan operasi, surplus defisit dari kegiatan non operasional (bila ada), pos luar biasa (bila ada), surplus/defisit-LO, penambahan pos-pos. Berikut laporan Operasional Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Per 31 Desember 2020 Dan 2019.

Tabel 4.5 Laporan Operasional Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Per 31 Desember 2020 Dan 2019

Uraian	2020	2019	Kenaikan/penurunan	%
Kegiatan Operasional				
Pendapatan-LO	0.00	20.700.000,00	(20.700.000,00)	0.00
Beban-LO	6.461.899.036,00	5.439.082.277,00	1.022.816.759,00	18.80
Kegiatan Non Operasional	0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus/Defisit-LO	(6.461.899.036)	(5.418.382.277)	(1.043.516.759,00)	19.26

Sumber: data diolah penulis, 2025

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dinas Sosial Kabupaten Kolaka memberikan penjelasan mengenai informasi umum tentang Dinas Sosial kabupaten Kolaka, dasar hukum, kebijakan akuntansi, kondisi ekonomi makro, target kerja APBD, serta rincian pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam penyusunan laporan operasional, pendapatan dan beban diakui berdasarkan basis akrual, yaitu saat pendapatan diterima dan beban dikeluarkan, serta kewajiban timbul tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau pengeluaran kas.

Evaluasi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas laporan keuangan yang disusun oleh Dinas Sosial Kabupaten Kolaka, dengan mengacu pada peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka mengacu pada peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat diukur berdasarkan empat karakteristik utama, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dinas Sosial Kabupaten Kolaka menunjukkan bahwa Laporan Keuangannya belum sepenuhnya memenuhi syarat agar dapat dikatakan sebagai laporan keuangan yang berkualitas, karena pada indikator Relevan terdapat kriteria yang belum tercapai yaitu indikator lengkap. Sementara tiga indikator lainnya, yaitu andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami telah tercapai dengan baik. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini adalah sebagai berikut:

1. Relevan

Relevansi laporan keuangan merujuk pada kemampuan laporan keuangan untuk memberikan informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna serta membantu mereka mengevaluasi keadaan masa lalu dan memprediksi masa depan. laporan keuangan juga dapat dikatakan relevan jika didukung oleh kriteria-kriteria seperti memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Laporan keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka disusun dengan memperhatikan setiap aspek yang disebutkan dalam SAP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Rutin dan Staf keuangan Dinas Sosial Kabupaten Kolaka, diketahui bahwa pihak Dinas sosial Kabupaten Kolaka telah berupaya keras untuk menyusun laporan keuangan yang relevan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memberikan umpan balik yang berguna bagi masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah dan memberikan kritik serta saran untuk perbaikan, tepat waktu dalam menyajikan laporan keuangan.

Dinas Sosial kabupaten Kolaka telah memenuhi tiga kriteria untuk mendapatkan laporan keuangan yang relevan. Namun, Dinas Sosial Kabupaten Kolaka belum memenuhi kriteria lengkap karena hanya menyajikan lima komponen laporan keuangan dan tidak menyertakan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih serta Laporan Arus Kas. Dengan demikian, laporan keuangan yang disajikan belum memenuhi kriteria lengkap sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010. Mengenai Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas, meskipun Saldo Anggaran Lebih menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten atau bendahara umum, SAL tetap harus dilaporkan dalam laporan keuangan Dinas atau SKPD, baik dalam bentuk Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Ini termasuk untuk mencatat perubahan atas sisa lebih anggaran tahun sebelumnya. Sedangkan Laporan Arus Kas, meskipun bisa saja merupakan bagian dari laporan yang lebih besar yang melibatkan bendahara umum atau entitas lain, tetap merupakan komponen laporan keuangan yang diharuskan dalam SAP, sebagai gambaran tentang arus kas yang masuk dan keluar.

2. Andal

Keandalan laporan keuangan berkaitan dengan kebenaran dan keakuratan informasi yang disajikan dalam laporan tersebut. Laporan keuangan dikatakan andal apabila bebas dari kesalahan material dan manipulasi, serta dapat diverifikasi oleh pihak ketiga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Rutin dan Staf Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Kolaka menegaskan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan, mereka berusaha untuk menyajikan informasi dengan jujur dan transparan. Kesalahan pencatatan memang

pernah terjadi, namun itu dianggap sebagai kelalaian yang bisa diperbaiki dan tidak disengaja. Dinas Sosial kabupaten Kolaka juga menerapkan prinsip *faithfulness of presentation*, yaitu menyajikan laporan sesuai dengan sebenarnya tanpa adanya upaya untuk memanipulasi data. Selain itu, laporan keuangan yang disusun dapat diverifikasi oleh pihak luar seperti Badan Pengawas Keuangan (BPK), yang memberikan jaminan tambahan terkait keandalan laporan tersebut. Keandalan laporan keuangan ini menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa laporan yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya publik.

Laporan keuangan ini secara umum memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang mewajibkan penyusunan laporan dengan mematuhi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini terlihat dari penyajian laporan yang lengkap dan detail dari Realisasi Anggaran, Neraca, Perubahan Ekuitas, hingga Laporan Operasional.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi laporan keuangan yang berkualitas jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain umumnya. Kebutuhan pengguna akan informasi laporan keuangan yang berbeda membutuhkan cara perbandingan laporan keuangan yang berbeda pula.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara rutin dan staf keuangan Dinas Sosial Kabupaten Kolaka, laporan keuangan pemerintah daerah Dinas Sosial Kabupaten Kolaka disusun dengan mempertimbangkan kemampuan untuk dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini penting agar pengguna laporan dapat melihat perkembangan kinerja keuangan pemerintah dari waktu ke waktu dan membuat analisis yang tepat berdasarkan data historis. Diketahui bahwa laporan keuangan yang disusun oleh Dinas Sosial Kabupaten Kolaka memenuhi kriteria dapat dibandingkan karena penyusunan laporan yang jelas, transparan, serta adanya penjelasan terhadap perubahan yang terjadi antara periode yang satu dengan yang lainnya.

4. Dapat dipahami

Karakteristik ini menunjukkan bahwa laporan keuangan harus disusun dengan cara yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh pengguna. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, baik dengan Bendahara Rutin maupun Staf Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Kolaka yang mengungkapkan bahwa laporan keuangan yang disusun sudah disajikan dengan cara yang sistematis dan jelas. Informasi keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku

dan dilengkapi dengan penjelasan yang memadai agar mudah dipahami oleh seluruh pihak yang berkepentingan, baik masyarakat umum maupun instansi terkait.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kolaka untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Masalah dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan sering kali muncul, karena setiap kegiatan tentu memiliki kekurangan. Namun, Dinas Sosial Kabupaten Kolaka telah berusaha sebaik mungkin untuk mengatasi kendala dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan tersebut.

Meskipun terdapat SDM di Dinas Sosial yang kurang mengerti tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan tetap dapat dikatakan berkualitas karena penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi SIPD yang sudah terformat dengan baik dan proses otomatisasi yang membantu dalam menyusun laporan sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, pengendalian internal yang kuat, serta audit eksternal, laporan keuangan tetap memenuhi kriteria kualitas meskipun pemahaman SAP terbatas., pengendalian internal yang kuat, serta audit eksternal, laporan keuangan tetap memenuhi kriteria kualitas meskipun pemahaman SAP terbatas

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka masih belum sepenuhnya memenuhi kriteria kualitas laporan keuangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan keuangan yang disusun oleh Dinas Sosial kabupaten Kolaka belum sepenuhnya dikatakan sebagai laporan keuangan yang relevan, karena terdapat kriteria yang belum tercapai yaitu kriteria lengkap. Meskipun demikian 3 kriteria sudah tercapai dengan baik yaitu kriteria memiliki umpan balik, memiliki manfaat prediktif dan tepat waktu.

Laporan keuangan Dinas Sosial Kabupaten Kolaka yang disusun dapat diandalkan karena disusun dengan jujur dan transparan serta bebas dari kesalahan material dan manipulasi. Meskipun ada kesalahan pencatatan yang bersifat kelalaian, laporan tersebut tetap dapat diverifikasi oleh pihak luar seperti Badan Pengawas Keuangan (BPK), yang menambah tingkat keandalan laporan.

Laporan keuangan Dinas Sosial Kabupaten Kolaka disusun dengan mempertimbangkan kemampuan untuk dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Hal ini

memudahkan para pengguna laporan untuk melihat perkembangan kinerja keuangan pemerintah dan membuat analisis yang relevan.

Laporan keuangan Dinas Sosial Kabupaten Kolaka disusun dengan cara yang sistematis dan jelas, menggunakan bahasa dan format yang memudahkan pemahaman bagi semua pihak yang berkepentingan, baik masyarakat maupun instansi terkait.

Dinas Sosial Kabupaten Kolaka telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah meskipun terdapat tantangan dalam hal pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di kalangan sumber daya manusia (SDM). Meskipun tidak ada pelatihan khusus, pegawai terus belajar secara mandiri dengan mengikuti pedoman dan peraturan yang berlaku, serta belajar dari rekan yang lebih berpengalaman. Penggunaan aplikasi SIPD yang terformat dengan baik dan dilengkapi dengan proses otomatisasi turut mendukung penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar. Selain itu, adanya sistem yang terintegrasi, pengendalian internal yang kuat, serta audit eksternal memastikan bahwa laporan keuangan tetap memenuhi kriteria kualitas meskipun pemahaman SAP terbatas. Dengan demikian, meskipun terdapat kekurangan dalam pemahaman SAP, laporan keuangan yang disusun oleh Dinas Sosial Kabupaten Kolaka tetap dapat dikatakan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Harfa Creative.
- Nasution, N. I. (2021). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar. *Universitas Islam negeri Sumatera Utara*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintah.
- Pratiwi, E. T., dkk. (2022). Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Baubau (Studi Kasus pada Inspektorat Daerah Kota Baubau). *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(1), 241–251.
<https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i1.1859>
- Rompas, F. V., & Kindangen, W. D. (2022). Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*.

- Subekti, F., dkk. (2024). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B. *Jurnal Buana Akuntansi*, 9(1).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, CV.
- Sumanti, A. O., dkk. (2022). Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya , dan Hukum)*.
- Utami, R. H. S., & Berliani, K. (2024). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bandung Tahun 2022). *Jurnal Maneksi*, 13(2).
- Wicaksono, G., dkk. (2022). *Teori Akuntansi*. PT. Global Eksekutif Teknologi.